

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Sistem ini memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, pemerintah, dan masyarakat. Secara umum, akuntansi terbagi menjadi beberapa cabang, salah satunya adalah akuntansi keuangan, yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku umum.

Dalam praktiknya, akuntansi tidak hanya diterapkan pada perusahaan yang berorientasi pada laba, tetapi juga pada entitas yang bertujuan sosial, yaitu entitas nonlaba. Entitas nonlaba adalah organisasi yang beroperasi untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan tanpa tujuan mencari keuntungan. Contoh entitas nonlaba meliputi yayasan, organisasi keagamaan, lembaga amal, dan asosiasi profesi. Berbeda dengan entitas bisnis, entitas nonlaba memperoleh sumber pendanaan dari donasi, hibah, atau iuran anggota, bukan dari hasil penjualan barang atau jasa. Oleh karena itu, akuntansi untuk entitas nonlaba memiliki karakteristik khusus yang menekankan transparansi dan akuntabilitas kepada para penyumbang serta pemangku kepentingan lainnya.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan memahami agama

Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren juga memiliki berbagai aktivitas sosial dan keagamaan, seperti pemberian zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pesantren tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pondok pesantren harus dilakukan dengan cermat dan transparan agar dapat memastikan keberlanjutan operasional serta kepercayaan dari masyarakat dan donatur (Hidayat, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren dihadapkan pada tuntutan yang lebih tinggi terkait dengan profesionalisme dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pengelolaan dana yang diterima dari berbagai pihak. Untuk itu, penggunaan standar akuntansi yang relevan sangat diperlukan, salah satunya adalah ISAK 335 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba (Aini, 2019).

ISAK 335 mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas nonlaba, yang mencakup pondok pesantren sebagai salah satu entitas tersebut. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada laba, pondok pesantren perlu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi tetap mempertimbangkan sifat khusus dari entitas nonlaba. ISAK 35 memberikan pedoman yang jelas tentang cara penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas yang menggambarkan aktivitas keuangan pondok pesantren secara lebih transparan dan akuntabel (Setiawan, 2020).

Penerapan ISAK 335 pada pondok pesantren menjadi sangat penting mengingat banyaknya dana yang diterima oleh pondok pesantren yang bersumber dari donatur, zakat, infak, dan sumber lainnya. Oleh karena itu, transparansi dalam laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pihak internal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur. Dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 335, pondok pesantren diharapkan dapat menunjukkan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dana yang telah diterima (Suharto, 2020).

Namun, dalam praktiknya, penerapan ISAK 335 di pondok pesantren menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa pondok pesantren masih kesulitan dalam memahami atau menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara tepat. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi, serta rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pengelola pondok pesantren (Samsudin, 2021). Selain itu, keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang dimiliki oleh pondok pesantren juga menjadi hambatan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada.

Pondok Pesantren Miftahut Taufik, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah cukup dikenal di masyarakat, juga tidak terlepas dari tantangan dalam penerapan ISAK 335. Meski sudah berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik, proses penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Upaya peningkatan pemahaman bendahara maupun pihak pengelola keuangan pesantren menjadi

kunci penting dalam menjawab tantangan ini, agar laporan keuangan tidak hanya disusun, tetapi juga dipahami dan dianalisis secara berkelanjutan (Wahyudi, 2023).

Laporan keuangan yang disusun dengan mengacu pada ISAK 335 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan pondok pesantren. Laporan posisi keuangan ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh pondok pesantren, yang mencerminkan sejauh mana pondok pesantren memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selain itu, laporan aktivitas juga akan menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama satu periode akuntansi, yang menjadi dasar untuk menilai efektivitas penggunaan dana (Prabowo, 2023).

Selain itu, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan ISAK 335 akan memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas, yang sangat penting untuk mengetahui seberapa besar dana yang tersedia untuk kegiatan operasional pondok pesantren. Dengan adanya laporan arus kas yang transparan, pihak pengelola dapat lebih mudah dalam merencanakan kebutuhan dana untuk kegiatan yang mendesak, seperti pembangunan fasilitas, gaji karyawan, serta keperluan lainnya (Indrawati, 2021).

Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan ISAK 335 di Pondok Pesantren Miftahut Taufik adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang akuntansi. Banyak pengelola pondok pesantren yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka kesulitan dalam memahami standar akuntansi yang cukup kompleks. Untuk mengatasi hal

ini, perlu adanya pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan pondok pesantren agar mereka dapat lebih memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Suhendra, 2020).

Selain itu, implementasi ISAK 335 juga terkendala oleh faktor keterbatasan teknologi. Banyak pondok pesantren yang masih menggunakan metode manual dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini tentu menyulitkan dalam hal akurasi, efisiensi, dan transparansi laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren, seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi yang dapat membantu dalam proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan (Kusnadi, 2022).

Tantangan lain yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Miftahut Taufik adalah masalah pengelolaan dana yang diterima dari berbagai sumber, seperti sumbangan masyarakat, pemerintah, dan zakat. Pengelolaan dana yang berasal dari berbagai sumber ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan penyajian laporan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan. ISAK 335 mengatur penyajian dana tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan gambaran yang transparan kepada pihak terkait, termasuk donatur dan masyarakat (Salim, 2021).

Dari sisi manajemen, penerapan ISAK 335 dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di pondok pesantren. Penyusunan laporan yang lebih sistematis dan terstruktur akan memudahkan pengelola pondok pesantren dalam

mengambil keputusan yang tepat terkait dengan penggunaan dana. Dengan laporan yang akurat dan terpercaya, pondok pesantren juga akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang ingin berkontribusi dalam program-program sosial yang dilaksanakan (Wahyudi, 2023).

Pentingnya penerapan ISAK 335 di pondok pesantren juga terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap pondok pesantren sangat bergantung pada kemampuan pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik. Dengan adanya laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, pondok pesantren dapat menjaga hubungan baik dengan donatur dan masyarakat (Hartono, 2020).

Selain itu, penerapan ISAK 335 di pondok pesantren juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan lembaga-lembaga nonlaba di Indonesia. Pemerintah melalui lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren, untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional dan transparan. Oleh karena itu, penerapan ISAK 35 di pondok pesantren menjadi sangat relevan dalam konteks regulasi ini (BPK, 2021).

Di Indonesia banyak sekali terdapat pesantren baik itu pesantren modern ataupun pesantren tradisional atau biasa disebut pesantren salafi, tetapi peneliti tertarik melakukan penelitian pada Pondok Pesantren Miftahut Taufik yang

beralamat di Jl. Mekarsari 2, RT.02/RW.09, Pasir Biru, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tentunya dalam Pondok Pesantren yang mana banyak sekali jalur keluar masuknya keuangan karena dibutuhkan untuk biaya operasi untuk pesantren seperti kebutuhan listrik, air, kebutuhan gedung dan lain-lain. Diharapkan pesantren ini tetap menerapkan ISAK 335 supaya bisa menjadi panutan untuk pendirian pesantren-pesantren lainnya

Menurut Wardiah (2016:196) budaya organisasi merupakan nilai-nilai dasar organisasi yang akan berperan sebagai landasan bersikap, berperilaku dan bertindak bagi semua anggota organisasi. Walaupun ini merupakan Pondok Pesantren yang tergolong pesantren kecil tentunya tetap harus melakukan menyampaikan laporan keuangan yang serupa dengan yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba pada umumnya, dengan fokus pada pesantren ini merupakan entitas Berorientasi Nonlaba yang mana didalamnya ada dana dari para Donatur dan Sumbangan yang harus disajikan dengan jelas sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pelaporan keuangannya, termasuk laporan keuangannya. Distribusi laporan keuangan yang disiapkan Bendahara Pondok harus mematuhi kriteria keuangan untuk entitas yang berorientasi nirlaba serta ISAK 335

Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat bagi dunia usaha untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan menunjukkan kinerja serta kesehatan keuangan mereka. dan memberikan kepercayaan bagi semua pihak. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian pada Pondok Pondok Miftahut Taufik, sebagaimana tercantum dalam

buku rekening disajikan oleh Pondok Pesantren Miftahut Taufik hanya menyajikan Laporan Arus Kas dan didalamnya tidak memisahkan antara sumbangan yang diberi batasan dan tanpa Batasan.

Dengan demikian Pondok Pesantren sudah menyajikan laporan keuangan, namun dalam penyajiannya belum mengikuti pedoman ISAK 335, Adapun permasalahan yang teridentifikasi yaitu: (1) Penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren ini masih sangat sederhana yang mana penyajiannya itu hanya sebatas arus kas masuk dan kas keluar saja (2) Laporan Posisi Keuangan yang seharusnya ada untuk menunjukkan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto namun Pondok Pesantren masih belum menyajikannya (3) Laporan Perubahan Aset Neto untuk menunjukkan informasi mengenai kinerja keuangan Pesantren selama beberapa periode tertentu pun Pondok Pesantren masih belum menyajikannya (4) Dalam Laporan Keuangannya tidak menyajikan Laporan Penghasilan Komprehensif sehingga tidak dapat diketahui klasifikasi pendapatan dan beban pada periode akuntansi berjalan (5) Pondok Pesantren Miftahut Taufik juga tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi terkait penjelasan pos pos laporan keuangan selama satu periode pelaporan dalam pengungkapan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan ISAK 335 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Pondok Pesantren Miftahut Taufik Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi penyusunan laporan keuangan di Pondok Pesantren Miftahut Taufik, ditemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara praktik pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan yang diatur dalam ISAK 335. Identifikasi masalah ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas aspek-aspek yang menjadi hambatan utama dalam penerapan standar pelaporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba.

Masalah yang teridentifikasi yakni :

1. Penyajian laporan keuangan masih sangat sederhana, terbatas pada laporan arus kas tanpa pelaporan lengkap sebagaimana diminta ISAK 335.

Pondok Pesantren Miftahut Taufik hanya menyusun laporan keuangan berupa arus kas masuk dan arus kas keluar tanpa adanya struktur laporan yang komprehensif. Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang tersedia belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan keuangan pesantren. Keterbatasan ini membuat laporan sulit digunakan untuk proses evaluasi, pertanggungjawaban, maupun pengambilan keputusan, karena tidak seluruh elemen laporan keuangan yang diwajibkan oleh ISAK 335 tercakup di dalamnya.

2. Tidak terdapat pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat, sehingga informasi penggunaan dana tidak dapat disajikan secara akuntabel.

Pesantren belum membedakan dana yang memiliki tujuan penggunaan tertentu dari donatur (dana terikat) dengan dana yang bebas digunakan (dana tidak terikat). Akibatnya, penggunaan dana tidak dapat ditelusuri sesuai dengan

peruntukannya, dan akuntabilitas menjadi sulit diwujudkan. Ketiadaan pemisahan ini juga membuat laporan keuangan tidak memenuhi standar nonlaba yang menekankan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

3. Belum disusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, dan CALK, yang merupakan komponen wajib dalam ISAK 335.

Beberapa komponen laporan keuangan utama tidak disusun oleh pesantren, seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Ketidakhadiran laporan-laporan ini mengakibatkan tidak adanya informasi terkait aset, kewajiban, pendapatan, beban, serta penjelasan tambahan yang diperlukan untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, laporan keuangan yang ada belum memenuhi struktur pelaporan standar ISAK 335.

4. Pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi kesalahan dan tidak mendukung penyajian laporan yang terstruktur.

Pengelolaan transaksi keuangan masih menggunakan pencatatan manual melalui buku tulis, yang rentan terhadap kekeliruan pencatatan, kehilangan data, atau kesulitan rekonsiliasi. Ketiadaan sistem digital atau perangkat lunak akuntansi membuat proses pencatatan memakan waktu dan tidak efisien, serta menyulitkan penyusunan laporan keuangan secara tepat dan rapi.

5. Keterbatasan kemampuan SDM di bidang akuntansi, khususnya terkait pemahaman standar pelaporan keuangan nonlaba.

Pengelola keuangan pesantren umumnya tidak memiliki latar belakang akuntansi yang memadai, sehingga pemahaman mengenai standar pelaporan keuangan, termasuk ISAK 335, masih rendah. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan menyusun laporan yang sesuai standar, serta kesulitan dalam menginterpretasikan struktur laporan yang seharusnya diterapkan.

6. Minimnya kebijakan dan pedoman internal mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Tidak terdapat aturan atau pedoman tertulis yang mengatur prosedur penyusunan laporan keuangan di pesantren. Akibatnya, proses pelaporan tidak dilakukan secara sistematis, tidak konsisten antarperiode, dan tidak mengacu pada standar tertentu. Minimnya kebijakan ini juga menghambat upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan secara berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Peneliti mengembangkan masalah berikut untuk memenuhi tujuan penelitian yang diantisipasi dan mempertimbangkan latar belakang yang disebutkan diatas

1. Bagaimana penerapan ISAK 335 dalam penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Miftahut Taufik ?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi pengelola keuangan Pondok Pesantren Miftahut Taufik dalam menerapkan ISAK 335?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian peneliti adalah untuk menemukan bukti empiris yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan ISAK 335 dalam penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Miftahut Taufik
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pengelola Pondok Pesantren Miftahut Taufik dalam menerapkan ISAK Nomor 335

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta membantu mengembangkan data teoritis yang aktual terkait penyajian laporan keuangan Lembaga yang berorientas nirlaba sesuai dengan ketentuan ISAK 335
 - b. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi syari'ah yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba, yang didasarkan pada ISAK 335

2. Manfaat Praktis

Selain itu, diharapkan banyak pihak yang dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, antara lain :

a. Bagi Peneliti

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang bagaimana organisasi nirlaba mempublikasikan laporan

keuangannya dan bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335. Hal ini juga akan memberikan mereka sarana untuk mengungkapkan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan tersebut mereka pelajari di kelas ke dunia nyata.

b. Bagi Pondok Pesantren

Penelitian yang diantisipasi dari Pondok Pesantren Miftahut Taufik ini juga akan membantu Pondok Pesantren Miftahut Taufik memperbaiki, mempertahankan, dan mengembangkan hal-hal yang perlu diperbaiki dan dipertahankan, khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Pemangku Kepentingan Eksternal

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber pengatahuan bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan keuangan organisasi dan memastikan dana mereka digunakan sebagai tujuan dan regulator memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber atau sumber bagi para sarjana yang berencana melakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek yang serupa